

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, (Jakarta: UNHCR, 2003), Hlm. 166
- Ahmed Abou-El-Wafa, *Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, UNHCR, Riyadh, 2009, h. 25-26
- Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.125
- Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, Penerbit Brilian Internasional, Surabaya, hlm. 73
- Erika Feller, *International Refugee Protection 50 years on: The Protection Challenges of the Past, Present and Future*, ICRC, September 2001, Vol. 83, No. 843, h. 594
- Farah Ramafitri, 2011, *Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesia Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951*, Fakultas Hukum UGM, hlm, 44
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2007 hal 126
- Ria Rosiana Simbolon, *Penundaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Oleh Pemerintah Indonesia*(jurnal), Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2004, hlm.452
- Sigit Riyanto, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 434-449.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 13-14.
- Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 39
- Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 279.
- Tamia Ayu Dian Faniati, 2012, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*, Fakultas Hukum UI, hlm. 79.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional* hlm.189

Yudha Bhakti Ardhiwisasra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm 19-22.

2. JURNAL

e-Journal Ilmu Hubungan Internasional Firman, Dampak Penerapan Undang – Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988 hal. 2

Sukanda Husin, 1998, “UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia”. *Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998*. Padang : FH Univ. Andalas

Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta, Hal. 186

3. MAKALAH

Danilo Batistuta. 1998. “*UNHCR Structure and Mandat*” Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Refugeema Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Tri Sakti dengan United Nations High Commissioner for Refugees tanggal 26 Maret 1998. Jakarta : UNHCR dan PSHH FH Usakti.

Enny Soeprapto, 1998 . “ *International Protection of Refugees and Bassic Principles of Refugee Law an Analysis*”, Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional *Refugee Law dan Displaced Persons* yang diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Tri Sakti dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* tanggal 26 Maret 1998 , Jakarta : UNHCR dan PSHH FH Usakti.

Haryo Mataram. 1998. “*International Law dan International Humanitarian Law*”. Makalah. Disampaikn dalam Seminar Nasional *Refugee Law dan Displaced Persons* yang diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Tri Sakti dengan United Nations High Commissioner for Refugees tanggal 26 Maret 1998. Jakarta : UNHCR dan PSHH FH Usakti.

J.M. Atik Krustiyati, 2004, *Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional*, Makalah disampaikan pada “*Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi*” di Pasuruan, 20-21 Desember 2004.

4. ARTIKEL

artikel 1 Bab.1 “Ketentuan umum konvensi 1954 tentang stateless persons” hal. 8

Ketiga tahapan disampaikan Jean-Yves Carlier dalam artikelnya “The Geneva Refugee Definition and ‘The Teory of The Three Scales’”. 1999 hlm. 140-144.

5. INTERNET

Webbster Ninth New Collegiate Dictionary, Merriam-Webster Inc, Springfield, Massachusetts, 1990, h. 991

Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-Perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada tanggal 24 September 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt587c5bda57122/melalui-perpres--pemerintah-tuangkan-penanganan-pengungsi-luar-negeri> di akses 15 desember 2017 pukul 10.00

<http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> diakses 5 oktober 2017 pukul 21:00

nited Nations General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950, diakses melalui <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27> pada 9 desember 2017 pukul 11.00.

UNHCR, “Office of the United Nations High Commissioner for Refugees”. <http://www.unhcr.org> . Diakses 20 desember 2017 pukul 12.15

Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Impersial, The Indonesian Human Rights Monitor, http://www.komunitasdemokrasi.or.id//comments.php?id=P194_0_11_0_C. Diakses pada 20 desember 2017 pukul 11.00.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html> di akses 26 januari 2018 pukul 03.26

6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*) dan Protokol tahun 1967 Tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*)

Universal Declaration of Human Right 1948

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.